

DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Dinas Sosial Kabupaten Solok telah dapat melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2018 sesuai rencana, serta menyusun laporan pelaksanaan berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2018.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2018 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Dinas Sosial Kabupaten Solok dalam memenuhi target-target kinerja yang telah ditetapkan serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2018).

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2018 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Solok di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan Visi - Misi Dinas Sosial Kabupaten Solok dan Visi - Misi Pemerintah Kabupaten Solok.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2018 ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengevaluasi capaian dan efektifitas program dan kegiatan yang dilakukan serta dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

Lubuk Selasih, Pebruari 2019

KEPALA DINAS SOSIAL

EDITIAWARMAN, S.Sos, M.Si

NIP. 19670817 199203 1 009

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR | 1 |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | 3 |
| BAB I | 5 |
| 1.1 Latar Belakang | 5 |
| 1.2 Maksud dan tujuan | 5 |
| 1.3 Struktur Organisasi | 6 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 9 |
| BAB II | 10 |
| 2.1. Perencanaan Strategis | 10 |
| 2.2. Perjanjian Kinerja | 11 |
| BAB III | 12 |
| 3.1. Capaian Kinerja Organisasi | 12 |
| 3.2 Realisasi Anggaran..... | 16 |
| PENUTUP | 19 |
| 4.1. Kesimpulan | 19 |
| 4.2. Saran | 19 |

RINGKASAN EKSKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2018 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Tahunan 2018 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2018.

Penyusunan LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2018 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2018. Dalam upaya merealisasikan good governance, Dinas Sosial Kabupaten Solok telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2016-2021.

Visi Dinas Sosial Kabupaten Solok yaitu **“Terwujudnya Pelayanan Sosial berkualitas menuju Kabupaten Solok yang maju dan mandiri”** dengan misi yaitu **“Mewujudkan pelayanan sosial yang berkualitas melalui perlindungan, jaminan, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial”**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut dalam tahun 2018 Dinas Sosial Kabupaten Solok telah merencanakan dan melaksanakan 9 Program 30 Kegiatan sesuai dengan skala prioritas melalui APBD Kabupaten Solok dan sumber dana Tahun Anggaran 2018, untuk mendukung pencapaian 24 Sasaran dalam 4 Indikator (Outcome /Output) yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, dengan hasil capaian indikator Kinerja Sasaran dengan capaian sebagai berikut :

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi | Capaian |
|----|--------------------------------|--|----------------|-----------|---------|
| 1 | Meningkatnya PMKS yang berdaya | Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan | 83.33% | 66.66% | 80% |

| | | | | | |
|---|--|--|--------|--------|--------|
| | | Sosial (PMKS) yang berwirausaha. | | | |
| 2 | Meningkatnya pelayanan dan penanganan PMKS | Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhinya perlindungan, jaminan kebutuhan dasar dan sosial | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial. | 44.17% | 37,20% | 84,26% |
| | | Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dilayani PSKS | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Meningkatnya kualitas pelayanan | Indeks kualitas pelayanan | 80.55 | 70.32 | |
| | Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja | Nilai evaluasi AKIP | bb | cc | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dinas sosial mempunyai tugas penting untuk melaksanakan berbagai prioritas yang tercantum di dalam RPJMD 2016-2021. Tugas berat namun sangat mulia ini harus kita lakukan dengan penuh kesungguhan, kreatif, efektif, efisien dan akuntabel. Untuk itu, diperlukan sinergitas dan koordinasi yang baik dari seluruh bidang agar seluruh sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam berbagai dokumen perencanaan, dapat tercapai secara optimal.

LKjIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Solok tahun 2018 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2018, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Solok pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Solok dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Target kinerja yang harus dicapai Dinas Sosial Kabupaten Solok tahun 2018, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016–2021 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan

transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing bidang yang ada di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Solok.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Solok adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Solok.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Solok. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Solok.

1.3 Struktur Organisasi

Menurut Peraturan Bupati Solok nomor 15 Tahun 2011 tentang Fungsi dan uraian tugas satuan kerja perangkat daerah. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Solok adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi:
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, Pengangkatan anak dan taman anak sejahtera;
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 - c. Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Susila, Korban Nafza dan Perdagangan orang.
4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi:
 - a. Seksi Perlindungan Sosial, korban bencana alam dan sosial;
 - b. Seksi Perlindungan Sosial, kepahlawanan dan keperintisan;
 - c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga Rentan, Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera.

5. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, membawahi :
- b. Seksi bantuan fakir miskin dan bantuan sosial;
 - c. Seksi pemberdayaan masyarakat, kelembagaan dan restorasi sosial;
 - d. Seksi penyuluhan dan sumbangan dana sosial/berhadiah.

Dalam Melaksanakan Tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok dibantu oleh 1(satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang masing masing mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

- a. Pengkoordinasian kegiatan sekretariat untuk memfasilitasi kelancaran tugas bidang sosial;
- b. Pelaksanaan dan penjabaran peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Pelaksanaan perumusan rencana strategis;
- d. Pelaksanaan pelayanan administrasi keluar dan didalam organisasi;
- e. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas dan urusan bidang sosial.

2. Bidang Rehabilitasi Sosial

- a. Perumusan konsep langkah kegiatan dibidang rehabilitasi sosial;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang rehabilitasi sosial;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dinas dibidang rehabilitasi sosial;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang rehabilitasi sosial;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

- a. Perumusan konsep langkah kegiatan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perlindungan dan jaminan sosial;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dinas dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;

4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;

- b. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
- c. Pengkoordinasian perencanaan dibidang peningkatan dan pengembangan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
- d. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas dibidang peningkatan dan pengembangan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Solok sampai akhir tahun 2018 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 24 (dua puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta 10 orang Tenaga Harian Lepas (data per 31 Desember 2018). Latar belakang pendidikan PNS bervariasi mulai SD hingga Strata Dua (S2). Rekapitulasi pegawai (PNS) berdasarkan pendidikan pada masing-masing Bidang Dinas Sosial Kabupaten Solok disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.

Rekapitulasi PNS Dinas Sosial Tahun 2018 Berdasarkan Pendidikan dan Bidang

| No | Tingkat Pendidikan | Secretaries | Bidang Resos | Bidang Linjamsos | Bidang Pemberdayaan fakir miskin | Total |
|---------------|--------------------|-------------|--------------|------------------|----------------------------------|-----------|
| 1 | S2 | 3 | | 1 | - | 4 |
| 2 | S1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 3 | D3 | 1 | - | - | 1 | 2 |
| 4 | D2 | - | - | - | - | - |
| 5 | SMA | 5 | - | 1 | 1 | 7 |
| 6 | SLTP | 2 | - | - | - | 2 |
| 7 | SD | 1 | - | - | - | 1 |
| Jumlah | | 17 | 5 | 5 | 6 | 34 |

Sumber data : Kasubag Umum dan Kepegawaian Tahun 2018

Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas Sosial yang beralamat di Jalan Raya Lubuk Selasih No.1 Solok. Dinas Sosial Kabupaten Solok memiliki sarana dan prasarana pendukung yang antara lain adalah :

1. Gedung Kantor 2 (Dua) Buah

2. Gudang Logistik 1 (Satu) Buah

Keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas fungsinya dan Pencapaian Target Kinerja Tahun 2018 Dinas Sosial Kabupaten Solok didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 5.092.408.907,- (Lima Milyard Sembilan Pulh Dua Juta Empat Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Rupiah). Realisasi keuangan Dinas Sosial sebesar Rp. 7.098.553.368,- (Tujuh milyar sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) atau sebesar 98,47%.

Tabel 2.
Alokasi dan Realisasi APBD Pada Dinas Sosial
Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2017 dan 2018

| NO | NAMA BIDANG | Tahun 2017 | | | Tahun 2018 | | |
|----|--|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|
| | | Alokasi | Realisasi | % | Alokasi | Realisasi | % |
| 1 | Sekretariat | 996.984.200 | 981.440.887 | 98.44 | 840.724.900 | 834.143.871 | 99.21 |
| 2 | Bidang Rehabilitasi Sosial | 385.557.000 | 379.930.529 | 98.54 | 379.930.529 | 379.930.529 | 97.86 |
| 3 | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial | 1.461.297.400 | 1.401.059.763 | 95.88 | 372.500.000 | 309.052.150 | 82.96 |
| 4 | Bidang Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan. | 112.300.000 | 111.463.000 | 99.25 | 1.137.940.000 | 1.110.904.400 | 97.62 |

Sumber data : Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas Sosial Kab. Solok

1.4 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018. Capaian Kinerja (*Performance results*) Tahun 2018 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) Tahun 2018 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance gap*) bagi perbaikan

kinerja di masa yang akan datang. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2018 berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sebagai berikut :

BAB I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, Maksud dan Tujuan, Struktur Organisasi dan Sistematika Penyajian;

BAB II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program kegiatan dan anggaran Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2018 meliputi RPJMD 2016-2021, Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dan Penetapan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2018.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Solok dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2018.

BAB IV – Penutup, menjelaskan simpulan meyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2018 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Solok tahun 2016-2021 merupakan perencanaan jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Solok yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Dinas Sosial Kabupaten Solok beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Solok telah mengacu kepada RPJMD Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok yang dapat diilustrasikan sebagai berikut :

a. Visi

Visi Dinas Sosial Kabupaten Solok yaitu **“Terwujudnya pelayanan sosial yang berkualitas menuju Kabupaten Solok yang maju dan mandiri”**.

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, Dinas Sosial misi yang akan dilakukan secara konsisten, yaitu **Mewujudkan pelayanan sosial yang berkualitas melalui perlindungan, jaminan, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial**

c. Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki peran penting dalam penyusunan RPJMD. Selaras dengan penerapan paradigma penganggaran berbasis kinerja, maka perencanaan pembangunan daerah prinsip yang sama.

Berikut ini adalah tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Solok.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (2016 – 2021)
Dinas Sosial Kabupaten Solok

| TUJUAN | SASARAN |
|--|---|
| Meningkatnya kesejahteraan sosial PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) | 1. Meningkatnya PMKS yang berdaya |
| Meningkatnya kualitas pelayanan PMKS | 1. Meningkatnya pelayanan dan penanganan PMKS |

2.2 PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2018

| NO | TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET |
|----|------------------------------|-------------------------|--------|
|----|------------------------------|-------------------------|--------|

| | | | |
|----|--|---|--------------------------------|
| 1 | Meningkatnya kesejahteraan sosial PMKS 1.1 Meningkatnya PMKS yang berdaya | Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berwirausaha | 83.33% |
| 2 | Meningkatnya kualitas layanan PMKS 1.1 Meningkatnya pelayanan dan penanganan PMKS | Persentase (%) Penyandang Masalah yang terpenuhinya perlindungan, jaminan kebutuhan dasar dan sosial Persentase (%) Penyandang Masalah yang mendapatkan rehabilitasi sosial. Persentase (%) PMKS yang dilayani PSKS | 100% 44.17% 100% |
| 3. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial 1.1 Meningkatnya kualitas layanan 1.2 Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja | Indeks Kualitas Pelayanan Nilai Evaluasi AKIP | 3.01 bb |

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Sesuai ketentuan, indikator kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Solok yang berupa keluaran (output) dan hasil (outcome).

- a. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik / non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan .
- b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Kesimpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

1. Lebih dari 100% = Sangat baik (A)
2. 76 % sampai 100% = Baik (B)
3. 56% sampai 75% = Cukup (C)
4. Kurang dari 55% = Kurang (K)

3.2 CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat keterkaitan antara pencapaian indikator kinerja utama (IKU) dengan program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2016 – 2021. Dalam analisis ini dilakukan dengan menggunakan data/informasi yang diperoleh secara lengkap dan akurat, data yang digunakan bersumber dari data intern Dinas Sosial Kabupaten Solok dan data dari instansi-instansi terkait.

Dari hasil perhitungan analisis dan penilaian terhadap capaian kinerja, secara umum Dinas Sosial Kabupaten Solok ternyata telah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

3.2.1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2018

Dinas Sosial Kabupaten Solok pada tahun 2018 mempunyai 4(Empat) indikator kinerja utama dan setiap indikator kinerja utama tersebut telah ditetapkan target kinerjanya. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan menghitung

persentase realisasi dibandingkan dengan target. Pada Tabel 3.1 disajikan capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Solok beserta persentase pencapaiannya.

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

| INDIKATOR KINERJA UTAMA | | SATUAN | TARGET | REALISASI | Persentase Capaian |
|--|--|--------|--------|-----------|--------------------|
| 1 | Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berwirausaha | % | 83.33% | 66.66% | 80 % |
| 2 | Persentase (%) Penyandang Masalah yang terpenuhinya perlindungan, jaminan kebutuhan dasar dan sosial | % | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Persentase (%) Penyandang Masalah yang mendapatkan rehabilitasi sosial. | % | 44.17% | 37.20% | 84.26% |
| 4 | Persentase (%) PMKS yang dilayani PSKS | % | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Indeks Kualitas Pelayanan | Indeks | 80 | 70.32 | |
| 6 | Nilai evaluasi AKIP | | bb | cc | |
| Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Utama | | | | | 91.06% |

1. Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berwirausaha
Formulasi perhitungan adalah :

Jumlah PMKS yang berwirausaha dibagi jumlah PMKS x 100%

Target untuk tahun 2018 adalah 12 kelompok /15 kelompok x 100% = 80% sedangkan realisasi sebanyak 12 kelompok/18 kelompok x 100% = 66.66%

Catatan : 1 kelompok = 10 orang

2. Persentase (%) Penyandang Masalah yang terpenuhinya perlindungan, jaminan kebutuhan dasar dan sosial

Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan untuk perlindungan, jaminan kebutuhan dasar dan sosial dibagi jumlah PMKS yang seharusnya memperoleh bantuan x 100%

Target untuk tahun 2018 adalah 20.545/20.545 x 100% = 100% sedangkan realisasi sebanyak 20.545/20.545 x 100% = 100%

3. Persentase (%) Penyandang Masalah yang mendapatkan rehabilitasi sosial

Jumlah PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dibagi jumlah PMKS yang seharusnya memperoleh bantuan perlindungan, jaminan kebutuhan dasar dan sosial x 100%

Target untuk tahun 2018 adalah $3000/6791 \times 100\% = 44.17\%$ sedangkan realisasi sebanyak $2526/3000 \times 100\% = 84.28\%$

4. Persentase (%) jumlah PMKS yang dilayani oleh PSKS

Jumlah PMKS yang dilayani PSKS dibagi Jumlah PSKS x 100%

Target untuk tahun 2018 adalah $413/413 \times 100\% = 100\%$ sedangkan realisasi sebanyak $413/413 \times 100\% = 100\%$

5. Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)

Target untuk tahun 2018 adalah 80 sedangkan realisasi sebanyak 70.32

6. Nilai evaluasi APIP

Target untuk tahun 2018 adalah bb sedangkan realisasi cc

3.2.2 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Sasaran 1. Meningkatnya PMKS berdaya

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target | | | Realisasi | | | % Capaian | | |
|----|---|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|---------|-----------|------|------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berwirausaha | % | 50% | 55.55% | 83.33% | 73% | 33.33 % | 66.66 % | 146% | 60% | 200% |

Sasaran 2. Meningkatnya Pelayanan dan penanganan PMKS

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target | | | Realisasi | | | % Capaian | | |
|----|--|--------|---------|--------|--------|-----------|---------|---------|-----------|--------|------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhinya perlindungan, jaminan kebutuhan dasar dan sosial | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial | % | 36.38 % | 40.36% | 44.17% | 7.58 % | 25.56 % | 37.20 % | 20.83 % | 63.33% | 100% |
| 3 | Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dilayani PSKS | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sasaran 3. Meningkatnya kualitas pelayanan

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target | | | Realisasi | | | % Capaian | |
|----|---------------------------|--------|--------|------|------|-----------|------|-------|-----------|------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 |
| 1 | Indeks Kualitas Pelayanan | % | - | - | 80 | - | - | 70.32 | - | - |

Sasaran 6. Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target | | | Realisasi | | | % Capaian | |
|----|---------------------|--------|--------|------|------|-----------|------|------|-----------|------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 |
| 1 | Nilai Evaluasi APiP | % | - | b | bb | - | c | cc | - | c |

3.2.3 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN /PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

85 s/d 100 : Sangat Berhasil

70 s/d 85 : Berhasil

55 s/d 70 : Cukup Berhasil

≤55 : Tidak Berhasil

Pencapaian kinerja sasaran Dinas Sosial Kabupaten Solok bias dilihat sebagaimana table berikut :

Tabel 3.2.3
Predikat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran

| | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Kriteria |
|---|--|---------------|------------------|----------------|-----------------|
| 1 | Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berwirausaha | 83.33% | 66.66% | 80% | Berhasil |
| 2 | Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhinya perlindungan, jaminan kebutuhan dasar dan sosial | 100% | 100% | 100% | Sangat Berhasil |
| 3 | Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial | 44.17% | 37.20% | 84.26% | Berhasil |
| 4 | Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dilayani PSKS | 100% | 100% | 100% | Sangat Berhasil |
| 5 | Indeks Kualitas pelayanan | Indeks | 80.00 | 70.32 | |
| 6 | Nilai evaluasi AKIP | | bb | cc | |

1. Untuk pencapaian indikator sasaran Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berdaya sebesar 80% dengan kriteria berhasil. Hal ini disebabkan karena target indikator sasaran pada matriks Renstra sebesar 83.33% (15 kelompok untuk 150 orang). Dengan anggaran yang tersedia jumlah PMKS yang berwirausaha dapat difasilitasi sebesar 66.66% (12 kelompok untuk 120 orang). Alternatif solusi yang dilakukan adalah dengan lebih memaksimalkan penggunaan anggaran baik yang bersumber dari dana APBD dan APBN pada kelompok KUBE sehingga pencapaian kinerja bisa meningkat untuk tahun berikutnya.
2. Untuk pencapaian indikator sasaran Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhinya perlindungan, jaminan kebutuhan dasar dan sosial sebesar 100%. Pada matrik Renstra ditargetkan 100% yaitu jumlah orang yang mendapatkan perlindungan, jaminan kebutuhan dasar dan sosial sebanyak 20.545 orang yang terdiri dari 20.545 penerima raskin. Sedangkan pada realisasinya 100% sebanyak 20.545 penerima raskin. Kenaikan pencapaian ini karena target penerima raskin yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan penganggaran yang bersumber dari APBN. Untuk korban bencana alam tanggap darurat yang memperoleh bantuan social sebesar 100%. Semua korban bencana alam sebanyak 2.948 orang telah diberi bantuan sembako.
3. Untuk pencapaian indikator sasaran Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial 84.26% dengan kriteria berhasil. Hal ini disebabkan karena target indikator sasaran pada matriks Renstra 44.17% (3000 orang). Dengan anggaran yang didapat tidak bisa melaksanakan sesuai dengan sesuai target pada Renstra sehingga hanya bisa mendapatkan bantuan rehabilitasi sosial untuk 2528 orang. Alternatif solusi yang dilakukan adalah dalam menentukan target indikator sasaran pada matrik Renstra perhitungan nilainya harus direncanakan dengan baik.
4. Untuk pencapaian indikator sasaran Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dilayani PSKS sebesar 100%. Sebanyak 413 lembaga/perseorangan telah berperan aktif sebagai Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
5. Untuk pencapaian indikator sasaran nilai Indeks Kualitas Pelayanan target pada matrik renstra 80 sedangkan realisasi sebesar 70.32 yang merupakan nilai rata-rata Indeks Kualitas Pelayanan pada tahun 2018.
6. Untuk pencapaian indikator sasaran Nilai evaluasi AKIP. Target pada matrik renstra bb sedangkan realisasi sebesar cc yang merupakan nilai rata-rata AKIP pada tahun 2018.

3.2.4 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pada table berikut disajikan target dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan sasaran kinerja.

| Indikator Kinerja | | Target | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) |
|-------------------|--|--------|--|--------------------|-------------------------|
| 1 | Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial. | 44.17% | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | 834.430.000 | 792.186.950 |
| | | | Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) | 20.500.000 | 20.487.100 |
| | | | Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial | 59.500.000 | 59.363.650 |
| | | | Peningkatan gizi bagi lansia terlantar/miskin dan cacat berat | 67.500.000 | 63.357.000 |
| | | | Fasilitasi penyandang disabilitas | 700.000 | 700.000 |
| | | | Fasilitasi sarana pendidikan bagi anak terlantar/miskin dan cacat berat | 126.250.000 | 125.812.000 |

| | | | | | |
|---|---|--------|--|-------------|-------------|
| 2 | Persentase (%) Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berwirausaha | 83.33% | Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | | |
| | | | Bimbingan sosial bagi penerima KUBE | 276.080.000 | 269.259.000 |
| | | | Program Keluarga Harapan | | |
| | | | Dana pendamping kegiatan program keluarga harapan | 70.500.000 | 67.870.000 |
| 3 | Persentase (%) Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhinya perlindungan, jaminan kebutuhan dasar dan sosial | 100% | Perdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | | |
| | | | Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS | 13.260.000 | 13.136.300 |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | | |
| | | | Penanganan Masalah- Masalah Strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa | 96.400.000 | 67.789.000 |
| | | | Peningkatan kualitas Pendistribusian beras miskin (Raskin) | 187.500.000 | 185.419.200 |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|------|--|---|---|
| 4 | Persentase PMKS yang dilayani PSKS | 100% | <p>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan</p> <p>Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial</p> <p>Bantuan biaya operasional</p> <p>Pemberdayaan lembaga koordinasi kesejahteraan Sosial (LKKS)</p> <p>Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan</p> <p>Peningkatan kualitas pengelolaan panti asuhan</p> <p>Program pelestarian Nilai-nilai kepahlawanan</p> <p>Peningkatan fasilitas Tamam Makan Pahlawan (TMP)</p> | 70.500.000 139.200.000 443.700.000 32.900.000 7.700.000 23.800.000 | 67.870.000 139.200.000 441.561.800 32.900.000 7.594.400 23.775.500 |
| 5 | Nilai SKM | 80 | <p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p>Penyedia Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p> <p>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional</p> <p>Penyediaan Alat Tulis Kantor</p> <p>Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan</p> <p>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan</p> | 605.483.500 6.000.000 18.281.500 9.500.000 44.232.000 17.250.000 8.000.000 | 598.997.021 6.000.000 18.144.920 4.807.500 44.232.000 17.249.825 7.978.750 |

| | | | | | |
|---|---------------------|----|---|--------------------|--------------------|
| | | | Bangunan | | |
| | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | 28.500.000 | 28.499.550 |
| | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | 158.850.000 | 158.275.676 |
| | | | Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Keamanan Teknis Perkantoran | 102.320.000 | 102.318.000 |
| | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | 211.550.000 | 211.490.700 |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 232.640.000 | 232.546.250 |
| | | | Pengadaan Gedung Kantor | 7.700.000 | 7.613.000 |
| | | | Pemeliharaan Rutin/berkala Kedaraan Dinas /Operasional | 224.940.000 | 224.933.250 |
| 6 | Nilai evaluasi APIP | bb | Program peningkatan Pengembangan system Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | | |
| | | | Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian kinerja dan keuangan | 2.601.400 | 2.601.400 |

3.2.5 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

| Indikator Kinerja | Target | Program/Kegiatan | Indikator Program/Kegiatan | Target | Realisasi |
|-------------------|--------|------------------|----------------------------|--------|-----------|
|-------------------|--------|------------------|----------------------------|--------|-----------|

3.2 REALISASI ANGGARAN

Adapun Total Anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 2.566.114.900,- (Dua milyar lima ratus enam puluh enam ribu seratus empat belas ribu Sembilan ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.508.267.421,- (Dua milyar lima ratus delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) dengan rician sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja Utama | Program dan Kegiatan | Program dan Kegiatan |
|-----|---------------------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Indeks Kualitas Pelayanan | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 605.483.500 |
| | | 1 PenyediaPenyediaan Jasa Surat Menyurat Jasa Surat Menyurat | 6.000.000 |
| | | 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 18.281.500 |
| | | 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 9.500.000 |
| | | 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor | 44.232.000 |
| | | 5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 17.250.000 |
| | | 6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan | 8.000.000 |
| | | 7 Penyediaan Makanan dan Minuman | 28.500.000 |
| | | 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | 159.850.000 |
| | | 9 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Keamanan Teknis Perkantoran | 102.320.000 |

| | | | | |
|---|---|--|---|--------------------|
| | | 10 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | 211.550.000 |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | 232.640.000 |
| | | 1 | Pemeliharaan rutin bangunan kantor | 7.700.000 |
| | | 2 | Pemeliharaan rutin kendaraan bermotor | 224.940.000 |
| | | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | | |
| | | 1 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | |
| 2 | Nilai Evaluasi AKIP | Program peningkatan Pengembangan system Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | | 2.601.400 |
| | | 1 | Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian kinerja dan keuangan | 2.601.400 |
| 3 | Persentase % PMKS yang berwirausaha | Program Keluarga Harapan | | |
| | | 1 | Dana pendamping kegiatan program keluarga harapan | 159.900.000 |
| | | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | | |
| | | 1 | Bimbingan sosial bagi penerima KUBE | 276.080.000 |
| | | 2 | Peningkatan kualitas Pendistribusian beras miskin (Raskin) | 187.500.000 |
| | | 3 | Pelatihan keterampilan dan praktek belajar bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak terlantar | - |
| | | 4 | Bantuan sosial bagi keluarga berumah tidak layak huni | - |
| 4 | Persentase % PMKS yang dilayani PSKS | Program Perdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | | |
| | | 1 | Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS | 13.260.000 |

| | | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan | | |
|---|--|---|---|-------------|
| | | 1 | Bantuan biaya operasional | 139.200.000 |
| | | 2 | Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial | 70.500.000 |
| | | 3 | Pemberdayaan lembaga koordinasi kesejahteraan Sosial (LKKS) | 443.700.000 |
| | | 4 | Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial | 59.500.000 |
| | | 5 | Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan | 32.900.000 |
| | | 6 | Peningkatan kualitas pengelolaan panti asuhan | 7.700.000 |
| | | Program pelestarian Nilai-nilai kepahlawanan | | |
| | | 1 | Peningkatan fasilitas Tamam Makan Pahlawan (TMP) | 23.800.000 |
| 5 | Persentase % PMKS direhabilitasi sosial | | Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial | |
| | | 1 | Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) | 20.500.000 |
| | | 2 | Peningkatan gizi bagi lansia terlanjar/miskin dan cacat berat | 67.500.000 |
| | | 3 | Fasilitasi saran pendidikan bagi anak terlanjar/miskin dan cacat berat | 126.250.000 |
| | | 4 | Fasilitasi penyandang disabilitas | 700.000 |
| 6 | Persentase % PMKS yang terpenuhi perlindungan, jaminan kebutuhan dasar dan sosial | | Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial | |
| | | 1 | Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS, KIS, KIP dan KKS | |
| | | 2 | Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa | 96.400.000 |

| | | | | |
|--|--|---|---|---------------------|
| | | Program pelestarian kepahlawanan | Nilai-nilai | 23.800.000 |
| | | 1 | Peningkatan fasilitas Makan Pahlawan (TMP) | Tamam 23.800.000 |

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dinas Sosial merupakan instansi Pemerintah yang diberikan tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial sesuai dengan kewenangannya sebagaimana tertulis dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Sosial berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2016-2021.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial ini menyajikan berbagai keberhasilan dan kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2018.

B. Saran

1. Dalam rangka mempertegas fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang Sosial perlu mempererat peran masing-masing bidang sehingga lebih efektif mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan yang mengacu pada RPJMD dan Renstra SKPD.
2. Diharapkan adanya terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja /Anggaran dari pola "Atas ke Bawah" menjadi "Bawah Ke Atas" sehingga mencerminkan kebutuhan Organisasi.
3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan akan sangat berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan apabila semua *Stake Holder Internal* dapat bersinergi dalam pencapaian target indikator kinerja tersebut.
4. Monitoring dan Evaluasi harus ditingkatkan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat tercapai sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
5. Perlunya koordinasi yang mantap didalam tubuh organisasi guna memperoleh ketepatan penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan dapat sesuai RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021, Renstra Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dan Penetapan Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Solok.
- 6.

Lubuk Selasih, Pebruari 2019
Kepala Dinas Sosial

EDITYAWARMAN, S.Sos, M.Si
NIP. 196708171992031009



7. Agar implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan menjadi efektif, perlu segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai suatu kesatuan, sehingga realisasi anggaran dan realisasi kinerja yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan *Output* maupun *outcomes* kegiatan yang bersangkutan dengan sinergitas tersebut, kinerja organisasi yang biayai oleh APBD menjadi benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.

1. Untuk pencapaian indikator Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan rehabilitasi social sebesar

Analisis Capaian Kinerja

Sasaran-sasaran yang telah ditetapkan tentu akan tercapai dengan adanya program dan kegiatan. Adapun Program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk pencapaian sasaran pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1. Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2017 | | | Tahun 2018 | | | Target 2021 (RPJMD) | % |
|----|---|--------|-------------------|--------------------|--------|-------------------|--------------------|-------|---------------------|------|
| | | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | | |
| 1 | Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial. | % | 20% (2745 org) | 3.94% (541 org) | 19.70% | 20% (2745 org) | 6.50% (893 org) | 32.5% | 13.726 | 100% |

Untuk mewujudkan sasaran rehabilitasi sosial diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial. Tahun 2018 dengan realisasi sebesar 6.50% dan realisasi capaian sebesar 32.5%. Hal ini terjadi kenaikan pencapaian realisasi sebesar 12.8% Pencapaian ini termasuk kategori sangat baik.

PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial tahun 2018 mengalami peningkatan yang signifikan karena banyaknya bantuan sosial yang diberikan kepada PMKS melalui kegiatan kegiatan rehabilitasi sosial seperti bantuan untuk penyandang disabilitas, bantuan sarana pendidikan bagi anak cacat/anak nakal dan anak terlantar, bantuan gizi

lansia terlantar, fasilitasi anak yang berhadapan dengan hukum dan penanganan terhadap ODGJ serta penanganan masalah bencana alam dan bencana sosial.

Sasaran 2. Meningkatnya Pemberdayaan PMKS

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2017 | | | Tahun 2018 | | | Target 2021 (RPJMD) | % |
|----|--------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|--------|------------------------------------|------------------------------------|-------|---------------------|------|
| | | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | | |
| 1 | Meningkatnya Pemberdayaan PMKS | % | 20.45% (18 kelompok untuk 180 org) | 6.81% (6 kelompok untuk 60 org) | 33.33% | 20.45% (18 kelompok untuk 180 org) | 13.63% (12 kelompok untuk 120 org) | 66.6% | 880 org | 100% |

Untuk mewujudkan sasaran pemberdayaan PMKS diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu Meningkatnya Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Capaian realisasi Pemberdayaan PMKS melalui kewirausahaan tahun 2018 sebesar 66.6% sedangkan tahun 2017 sebesar 33,33%. Hal ini mengakibatkan terjadinya kenaikan capaian realisasi sebesar 33.3%. Kenaikan ini disebabkan bertambahnya kelompok penerima bantuan KUBE (Kelompok Usaha bersama)_ sebanyak 6 kelompok KUBE atau 60 orang KPM. Sedangkan target berdasarkan RPJMD sebesar 88 kelompok dengan realisasi capaian 100%

Adanya upaya pemberdayaan PMKS ini didukung oleh program Pemberdayaan kelembagaan dan fakir miskin pada kegiatan KUBE.

Sasaran 3. Meningkatnya perlindungan, jaminan pemenuhan kebutuhan dasar dan sosial.

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2017 | | | Tahun 2018 | | | Target 2021 (RPJMD) | % |
|----|--|--------|--------------------|---------------------|------|----------------------|----------------------|--------|---------------------|------|
| | | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | | |
| 1 | Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhinya perlindungan, jaminan kebutuhan dasar dan sosial | % | 100% (129.050 org) | 6.81% (129.050 org) | 100% | 66.45% (129.050 org) | 150.5% (194.195 org) | 150.5% | 129.050 org | 100% |

Untuk mewujudkan sasaran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhinya perlindungan, jaminan kebutuhan dasar dan sosial. diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhinya perlindungan, jaminan kebutuhan dasar dan sosial

Capaian realisasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhinya perlindungan, jaminan kebutuhan dasar dan sosial Tahun 2018 adalah

sebesar 150.5% sedangkan tahun 2017 sebesar 100%. Hal ini mengakibatkan terjadinya kenaikan capaian realisasi sebesar 50.5%.

Kenaikan ini disebabkan karena terjadinya penambahan KPM terhadap rastra, KIS dan PKH sebesar 65.145 jiwa. Sedangkan target berdasarkan RPJMD sebesar 129.050 jiwa dengan realisasi capaian 100%

Adanya upaya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhinya perlindungan, jaminan kebutuhan dasar dan sosial didukung oleh program Beras sejahtera, dan Program PKH dan beberapa program yang berasal dari APBN dan APBD Propinsi seperti KIS dan KIP.

NAMA PSKS DINAS SOSIAL

| NO | NAMA PSKS | JUMLAH |
|----|-----------|--------|
| 1 | PKH | 76 |
| 2 | TAGANA | 40 |

| | | |
|----|----------------|-----|
| 3 | TKSK | 14 |
| 4 | PSM | 74 |
| 5 | SLRT | 60 |
| 6 | LK3 | 10 |
| 7 | LKKS | 30 |
| 8 | KARANG TARUNA | 88 |
| 9 | SAKTI PEKSOS | 1 |
| 10 | PENGURUS PANTI | 20 |
| | JUMLAH | 413 |

LUBUK SELASIH, 11 MARET 2019
KEPALA

EDITIAWARMAN, S.Sos, M.Si
NIP. 196708171992031009